

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Oleh:

**Yurianto¹
Akhdad Tantowi²**

*Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta¹
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah²*

Email:

*yuribpsdm@gmail.com
atantowi75@gmail.com*

ABSTRAK

Belanja modal oleh pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) menggunakan data periode 1987-2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara belanja modal Pemprov DKI Jakarta dengan variabel pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Pada jangka panjang maupun jangka pendek, perkembangan belanja modal Pemprov DKI Jakarta dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Apabila terjadi gangguan atau guncangan terhadap keseimbangan, maka sekitar 74,02 persen ketidakseimbangan yang terjadi pada periode sebelumnya akan kembali pada titik keseimbangan pada periode saat ini.

Kata kunci: ARDL, Bound Test, Kointegrasi, ECM

ABSTRACT

Capital expenditures by local governments are carried out in the context of procuring tangible fixed assets to finance the implementation of regional autonomy which ultimately aims to improve people's welfare. This study aims to investigate the effect of local revenue and revenue-sharing on capital expenditures in DKI Jakarta Province with the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach using data for the period 1987-2020. The results of the study indicate that there is a long-term relationship between the capital expenditures of the DKI Jakarta Provincial Government and the variables of local revenue and revenue-sharing funds. In the long run and the short run, the capital expenditure development of the DKI Jakarta Provincial Government is significantly influenced by the level of local revenue and revenue-sharing funds. If there is a disturbance or shock to the balance, then about 74.02 percent of the imbalance that occurred in the previous period will return to the equilibrium point in the current period.

Keywords: ARDL, Bound test, Cointegration, ECM

A. PENDAHULUAN

Diskusi tentang keuangan daerah maka fokus yang penting adalah isu terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Secara konsep, APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah daerah dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, APBD juga merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Berdasarkan regulasi, komponen APBD meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Dalam Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 dijelaskan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara konsep, dalam APBD harus dipenuhi persyaratan keseimbangan. Besarnya pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan harus sama dengan besarnya belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian antara pendapatan dan belanja daerah mempunyai hubungan kausatif pada kerangka APBD. Jadi, besarnya pendapatan akan mempengaruhi besarnya pengeluaran atau belanja daerah.

Besarnya pengeluaran pemerintah daerah diyakini mempengaruhi kinerja perekonomian suatu daerah dan pada gilirannya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sari & Fakhruddin (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi sumber daya manusia baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Rambe & Febriani (2020) juga menemukan pengeluaran pemerintah

dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian.

Pengeluaran pemerintah daerah dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja modal dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Pada akhirnya pelaksanaan belanja modal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian menemukan bahwa belanja modal sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah. Menurut Yunus & Amirullah (2019), belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh. Hasil penelitian Waryanto (2017) juga menemukan bahwa di Indonesia periode 1990-2015 belanja modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa belanja modal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan yang muncul dalam diskusi ini adalah seberapa besar pendapatan daerah berpengaruh terhadap besarnya belanja modal daerah. Kenyataan yang terjadi, ada daerah dengan pendapatan daerah tinggi dengan asumsi penerimaan pembiayaan tetap, tetapi belanja kecil karena sebagian digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Sebaliknya, ada daerah dengan pendapatan rendah, tetapi jumlah belanjanya besar karena penerimaan pembiayaan besar dan pengeluaran pembiayaannya rendah. Kondisi seperti ini yang menjadikan perlu dilakukan kajian mendalam tentang hubungan kausatif antara pengaruh tingkat pendapatan terhadap belanja modal.

Pengalokasian belanja modal bergantung kepada beberapa faktor. Selain dipengaruhi besarnya pengeluaran untuk belanja rutin, belanja modal juga ditentukan oleh besarnya dana yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber pendanaan belanja modal dapat berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Pendapatan daerah dari kedua sumber ini akan mempengaruhi besarnya alokasi untuk belanja modal. Peningkatan penerimaan dari PAD dan dana perimbangan diharapkan akan menaikkan belanja modal pemerintah daerah, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Beberapa penelitian menemukan pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan baik secara simultan maupun parsial mempengaruhi belanja modal. Diantaranya, Pratiwi (2019), Nafus & Asmara (2017), Clara & Mulyani (2015), dan Subowo & Wati (2010). Namun, penelitian oleh Suryani & Pariani (2018), Ndede, et al. (2016), dan Mentayani & Rusmanto (2013) menemukan PAD tidak mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian dilandasi beberapa sebab. Pertama, selain sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan keuangan nasional yang tentu mempunyai peran yang penting dalam perekonomian nasional. Kedua, sebagai pusat perekonomian, DKI Jakarta merupakan daerah dengan PAD tertinggi di Indonesia. PAD merupakan sumber penerimaan utama Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dengan kontribusi terhadap total penerimaan sekitar 65 persen setiap tahun. Ketiga, keunikan keuangan DKI Jakarta, yaitu sejak tahun 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menerima DAU dan diganti DAK, sehingga belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergantung penerimaan dari PAD dan DBH.

Dengan mendasarkan pada uraian sebelumnya, penting untuk diteliti pengaruh PAD dan DBH terhadap belanja modal di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi dan menganalisis pengaruh PAD dan DBH terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 1987-2020. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas penerimaan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk belanja modal yang akan berdampak pada perekonomian di Provinsi DKI Jakarta.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18, pendapatan asli daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain pendapatan daerah yang sah. Adanya PAD merupakan perwujudan desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi yang dimiliki.

Dana Bagi Hasil

Selain PAD, pemerintah daerah juga menerima dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau antar-daerah. Salah satu dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dana bagi hasil (DBH) merupakan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang diberikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam meliputi kehutanan; pertambangan umum; perikanan; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas bumi; dan pertambangan panas bumi.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh *asset* dan/atau menambah nilai *asset* tetap atau *asset* lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi *asset* tetap atau *asset* lainnya yang ditetapkan pemerintah. Wujud belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Penelitian Terdahulu

Pratiwi (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara Nufus & Asmara (2017) menemukan bahwa secara simultan PAD dan dana perimbangan mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Aceh, tetapi PAD berpengaruh negative sementara dana perimbangan positif.

Selanjutnya Clara & Mulyani (2015) juga menemukan PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja modal pemerintah daerah se-Jawa Barat. Subowo & Wati (2010) juga menemukan hubungan yang kuat antara PAD dan DAU dengan belanja modal.

Namun, Suryani & Pariani (2018) menemukan meskipun secara simultan PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, tetapi secara parsial DAU tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian oleh Ndede (2019) juga menemukan secara parsial PAD tidak mempengaruhi belanja modal Pemerintah Kota Manado, meskipun secara simultan PAD dan DAK mempengaruhi belanja modal. Hasil yang sama ditemukan Mentayani & Rusmanto (2013) dimana secara parsial PAD tidak mempengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan, meskipun secara simultan DAU, PAD, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh.

C. METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan metode penelitian dan hipotesis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada periode tahun 1987-2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan variabel berupa data keuangan dalam bentuk nominal. Untuk mengetahui hubungan antara variabel penerimaan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dan belanja modal (BLJMDL) akan digunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Pemilihan model ARDL karena ARDL mampu melihat pengaruh terikat (Y) dan variabel bebas (X) dari waktu ke waktu. Selain itu juga dapat melihat pengaruh variabel Y masa lampau terhadap Y masa kini. Dalam penelitian ini juga akan ditambahkan satu variabel *dummy* yang mempresentasikan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Untuk pengolahan data

kuantitatif, peneliti akan menerapkan kaidah dasar dalam statistika dan ekonometrika dengan bantuan *software Eviews 6* dan *Microfit 5.0*.

Spesifikasi Model

Model *double log* akan digunakan untuk mengestimasi fungsi belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan model *double log* didasarkan karena kemudahan analisis, dimana koefisiennya menunjukkan nilai elastisitasnya. Model yang diajukan adalah:

$$\ln BLJMDL_t = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_t + \beta_2 \ln DBH_t + \beta_3 D_{9798} + u_t \dots\dots\dots(1)$$

Kointegrasi

Untuk menguji ada tidaknya kointegrasi antar variabel dari model yang diajukan, penelitian ini akan menggunakan *ARDL bounds test* yang diajukan oleh Pesaran et al. (2001). Pemilihan model ini didasari beberapa alasan, diantaranya: (1) adanya konsistensi hasil estimasi koefisien jangka panjang untuk variabel-variabel yang terintegrasi pada ordo 1 atau 0 (Pesaran et al., 2001); (2) secara umum metode ini menghasilkan nilai estimasi yang tidak bias (*unbiased*) dan statistik t yang valid meskipun regressornya adalah *endogenous*; dan (3) dengan jumlah sampel yang relatif kecil (34 observasi) pendekatan ini lebih baik dibandingkan menggunakan prosedur Johansen yang membutuhkan sampel besar agar diperoleh hasil yang konsisten.

Modifikasi persamaan (1) menjadi *ARDL-error correction model* dilakukan agar dapat menggunakan prosedur model *ARDL bound test*, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta \ln BLJMDL_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p1} \beta_j \Delta \ln BLJMDL_{t-j} + \sum_{j=0}^{p2} \delta_j \Delta \ln PAD_{t-j} + \sum_{j=0}^{p3} \varphi_j \Delta \ln DBH_{t-j} + \mu_1 \ln BLJMDL_{t-1} + \mu_2 \ln PAD_{t-1} + \mu_3 \ln DBH_{t-1} + \mu_4 D_{9798} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(2)$$

Langkah pertama yang dilakukan dari pendekatan model *ARDL* adalah mengestimasi persamaan (2) menggunakan metode kuadrat terkecil sederhana (*ordinary least square, OLS*). Selanjutnya melakukan pengujian adanya hubungan kointegrasi dengan restriksi semua koefisien estimasi dari semua *lag* level variabelnya sama dengan 0. Jadi, hipotesis nolnya adalah $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = 0$, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah $H_a: \mu_1 \neq 0; \mu_2 \neq 0; \mu_3 \neq 0; \mu_4 \neq 0$, yang asimtotik dengan non standar distribusi F. Batas nilai kritis untuk uji kointegrasi adalah apabila variabel-variabel bebasnya $I(d)$, dimana $0 \leq d \leq 1$. Menganggap seluruh variabel bebasnya $I(0)$ merupakan batas bawahnya, sedangkan $I(1)$ untuk batas atasnya. Jika nilai F_{hitung} lebih besar dari batas atas, maka H_0 ditolak, artinya ada kointegrasi. Sebaliknya, jika nilai F_{hitung} lebih kecil dari batas bawah, maka H_0 tidak dapat di tolak, artinya tidak ada kointegrasi. Sementara jika nilai F_{hitung} berada diantara batas bawah dan atas, maka ada atau tidaknya hubungan kointegrasi tidak dapat diputuskan. Setelah hasil uji menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel dalam model, maka dengan informasi kriteria, seperti kriteria *Schwartz Bayesian* atau *Akaike information*, model *long-run* dan *short-run* dapat dibangun.

Pengujian kointegrasi dengan pendekatan ARDL tidak mensyaratkan uji akar unit untuk variabel-variabel yang digunakan sebagaimana yang disyaratkan pada pendekatan lain seperti teknik Johansen (Pesaran et al., 2001). Akan tetapi jika beberapa variabel mempunyai ordo integrasi lebih dari satu, seperti I(2), maka nilai kritis yang dibuat Pesaran et al. (2001) menjadi tidak valid. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan uji akar unit sebelum dilakukan estimasi model untuk meyakinkan ketepatan metode yang digunakan. Penelitian ini akan menggunakan uji Augmented Dickey Fuller (ADF) dan Philips-Perron (PP) untuk menguji ada atau tidaknya akar unit variabel-variabel yang digunakan dalam model.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Akar Unit

Hasil uji akar unit pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dengan uji ADF maupun PP pada level signifikansi 5 persen, semua variabel terintegrasi pada ordo 1. Dengan hasil uji akar unit semua variabel I(1), maka model ARDL dapat digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1.
Hasil Uji Akar Unit (Dengan Konstanta Tanpa Trend)

Variable	Level		1 st Diff		Ket
	ADF	PP	ADF	PP	
LnBLJMDL	-2,034905	-2,803650*	-6,077179***	-6,163769***	I (1)
LnPAD	-1,304793	-1,726132	-7,204527***	-8,324373***	I (1)
LnDBH	-1,288765	-1,489216	-8,510380***	-8,329496***	I (1)

Keterangan: ***, ** dan * menunjukkan signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%. Nilai kritis berdasar nilai hasil penghitungan McKinnon (1991). Untuk menghitung test ini digunakan software Eviews 6.

Sumber: data diolah

Hubungan Jangka Panjang

Estimasi persamaan (1) dilakukan dengan menggunakan data tahunan pada periode 1987–2020. Sebelum menguji adanya hubungan jangka panjang antar variabel pada model yang diajukan, maka harus lebih dahulu dilakukan pemilihan *lag* optimal dari model ARDL. Dalam penelitian ini, pemilihan *lag* menggunakan *unrestricted vector autoregression* (VAR) pada *first-difference*. Menurut Pesaran dan Shin (1997), panjang *lag* maksimal yang dipergunakan untuk data tahunan adalah 2. Berdasar semua kriteria, *lag* 1 dipilih sebagai *lag* yang optimal untuk dipergunakan dalam estimasi terhadap persamaan umum ARDL (lihat Tabel 2).

Tabel 2.
Hasil Pemilihan Panjang Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-3.700610	NA*	0.094867	0.481288	0.664505	0.542019
1	-1.635086	3.485571	0.088868*	0.414693*	0.643714*	0.490607*
2	-1.127285	0.825177	0.091819	0.445455	0.720281	0.536552

* indicates *lag* order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
 Untuk menghitung test ini digunakan software Eviews 6.
 Sumber: data diolah

Selanjutnya, Tabel 3 memperlihatkan hasil uji untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang antar variabel dengan *bound test*. Hasil *bound test* menunjukkan bahwa pada level 5 persen nilai F_{hitung} lebih besar dari pada batas atas nilai kritis dari Pesaran et al. (2001). Kesimpulannya hipotesis bahwa tidak ada kointegrasi antar variabel ditolak, yang berarti ada hubungan jangka panjang antar variabel dalam model yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.
Hasil ARDL Bound Test

F_{hitung}	Nilai Kritis pada Level 5%	
	Batas Bawah	Batas Atas
5,6091	4,3270	5,4821

Keterangan: Untuk menghitung test ini digunakan software Microfit 5.0

Sumber: data diolah

Setelah melakukan pengujian dan terbukti ada hubungan jangka panjang antar variabel dari model yang digunakan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan estimasi koefisien jangka panjang dan dinamika jangka pendek menggunakan model ARDL yang terpilih. Dengan panjang *lag* maksimal 1, metode ARDL melakukan estimasi terhadap $(1 + 1)^3 = 8$ model regresi untuk mendapatkan panjang *lag* optimal dari masing-masing variabel. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa berdasarkan kriteria *Shwarz Bayesian Criterion* (SBC) diperoleh spesifikasi model ARDL (1,0,0).

Tabel 4.
Hasil Estimasi ARDL (1,0,0)
Variabel dependen: LnBLJMDL

Variabel Independen	Koefisien	Standard Error	T-Ratio
LnBLJMDL(-1)*	0,25978	0,13118	1,9803
LnPAD**	0,33103	0,13193	2,5092
LnDBH***	0,52042	0,11488	4,5301
D9798	-0,34058	0,20639	-1,6502
KONSTANTA**	-1,40340	0,56930	-2,4651
$R_2 = .98547$		$DW = 1,9015$	
$\bar{R}_2 = .98339$			

Keterangan: ***, ** dan * menunjukkan signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%. Untuk menghitung test ini digunakan software Microfit 5
Sumber: data diolah

Sebelum melakukan estimasi model ARDL, harus dilakukan lebih dahulu beberapa uji diagnosis agar model ARDL yang diestimasi terhindar dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar ekonometri. Empat jenis uji diagnosis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji korelasi serial, spesifikasi fungsi, normalitas, dan heteroskedastisitas. Apabila model sudah lolos dari masalah asumsi ekonometri, maka analisis dan kesimpulan dari hasil regresi dapat dilakukan.

Hasil uji LM pada Tabel 5 menunjukkan bahwa semua tidak signifikan pada level 5 persen. Ini berarti tidak ada masalah terkait asumsi auto korelasi, kenormalan, spesifikasi, dan heteroskedastisitas dalam model yang diajukan. Selanjutnya, analisis dan kesimpulan terhadap hasil regresi yang dihasilkan dapat dilakukan.

Tabel 5.
Diagnosa Asumsi Dasar Ekonometri

Uji Statistik	LM version	F version
Korelasi serial	0,1756 [0,675]	0,1444 [0,707]
Spesifikasi fungsi	2,0467 [0,153]	1,7853 [0,193]
Normalitas	5,3130 [0,070]	N.A
Heteroskedastisitas	0,0091 [0,924]	0,0086 [0,927]

Keterangan: ***, ** dan * menunjukkan signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%. Angka dalam kurung menunjukkan nilai probabilitas. Untuk menghitung test ini digunakan software Microfit 5.0. Angka dalam [] menunjukkan probabilitas

Sumber: data diolah

Nilai elastisitas jangka panjang dari setiap variabel dari model dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6. Pembahasan untuk setiap variabel adalah sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah

Hasil estimasi menunjukkan koefisien variabel pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai tanda sesuai harapan (positif) dan signifikan pada α 1 persen. Nilai koefisien 0,44721 yang berarti bahwa peningkatan PAD sebesar 1 persen *ceteris paribus*, dalam jangka panjang akan meningkatkan laju belanja modal Pemprov DKI Jakarta sebesar 0,45 persen. Hasil ini memiliki makna peningkatan PAD akan meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas sektor publik (belanja modal). Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan sektor publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut serta pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019), Nafus & Asmara (2017), Clara & Mulyani (2015), dan Subowo & Wati (2010), yang

menemukan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana perimbangan yang berupa dana bagi hasil, DAU, dan DAK digunakan untuk belanja kepentingan umum dan kepentingan khusus sesuai dengan prioritas nasional dan pengembangan potensi wilayah daerah agar terciptanya kesejahteraan di daerah tersebut. Peningkatan dana perimbangan diharapkan akan menopang belanja modal yang belum dapat dilakukan pemerintah daerah karena keterbatasan dana.

Hasil estimasi koefisien variabel dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal Pemprov DKI Jakarta mempunyai tanda sesuai harapan (positif) dan signifikan pada level 1 persen. Nilai koefisien sebesar 0,70307 yang berarti bahwa peningkatan DBH sebesar 1 persen *ceteris paribus*, dalam jangka panjang akan meningkatkan laju belanja modal Pemprov DKI Jakarta sebesar 0,70 persen.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putra & Dewi (2018) dan Subowo & Wati (2010) yang menemukan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat mempengaruhi secara positif belanja modal pemerintah daerah.

Krisis Ekonomi 1997-1998

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah menyebabkan perekonomian Indonesia pada titik nadir, tak terkecuali perekonomian DKI Jakarta. Akibat krisis tersebut, terjadi banyak perubahan mendasar terhadap tatanan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara (Karmeli & Fatimah, 2008). Koefisien variabel *dummy* yang merepresentasikan krisis ekonomi tahun 1997-1998 bertanda negatif, yang berarti terjadi penurunan nilai belanja modal akibat krisis tersebut, tetapi secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan.

Tabel 6.
Hasil Estimasi Jangka Panjang ARDL (1,0,0)

Variabel	Koefisien	Standard Error	T-ratio
LnPAD ***	0,44721	0,14127	3,1657
LnDBH ***	0,70307	0,10895	6,4533
D ₉₇₉₈	-0,46011	0,30119	-1,5277
KONSTANTA ***	-1,89590	0,55059	-3,4434

Keterangan: ***, ** dan * menunjukkan signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%. Untuk menghitung test ini digunakan software Microfit 5.0

Sumber: data diolah

Hubungan Jangka Pendek

Hasil estimasi dinamika jangka pendek dapat dilihat pada Tabel 7, dimana koefisien *error correction* (-0,74022) secara statistik signifikan pada tingkat 1 persen dengan tanda negatif. Hasil ini mendukung adanya hubungan jangka pendek diantara variabel yang digunakan dalam model yang diajukan. Koefisien *error*

correction sebesar 0,74022 menunjukkan kecepatan proses penyesuaian apabila terjadi gangguan/goncangan terhadap keseimbangan. Sekitar 74,02% ketidakseimbangan yang terjadi pada periode sebelumnya akan kembali pada titik keseimbangan pada periode saat ini.

Tabel 7.
Hasil Estimasi Jangka Pendek ARDL (1,0,0)

Variabel	Koefisien	Standard Error	T-Ratio
ΔLnPAD^{**}	0,33103	0,13193	2,5092
$\Delta \text{LnDBH}^{***}$	0,52042	0,11488	4,5301
ΔD_{9798}	-0,34058	0,20639	-1,6502
$\text{Ecm}(-1)^{***}$	-0,74022	0,13118	-5,6426

Keterangan: ***, ** dan * menunjukkan signifikan pada level 1%, 5%, dan 10%. Untuk menghitung test ini digunakan software Microfit 5

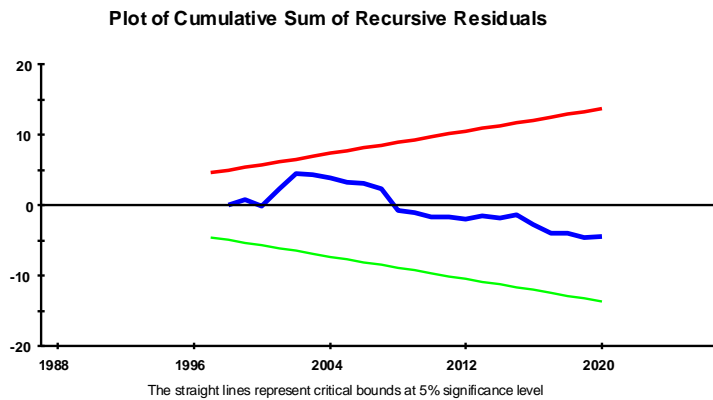
Sumber: data diolah

Sementara koefisien ΔLnPAD dan ΔLnDBH mempunyai tanda positif dan signifikan pada α 5 persen, menunjukkan bahwa perubahan pendapatan asli daerah dan dana hasil akan langsung direspon peningkatan belanja modal Pemprov DKI Jakarta.

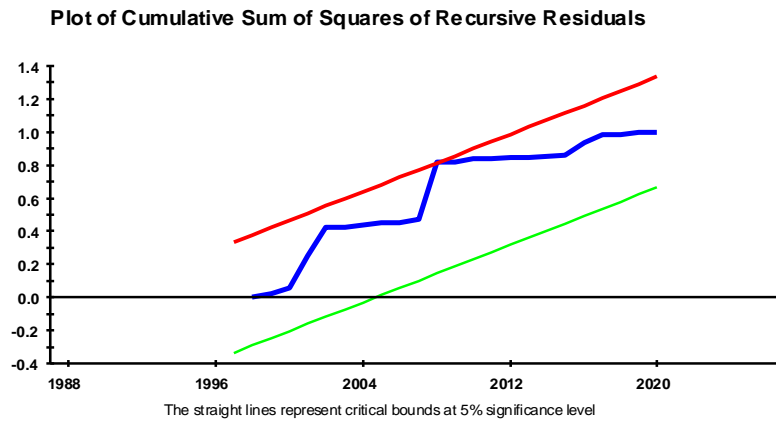
Stabilitas Model

Langkah terakhir terkait hasil estimasi dari model yang diajukan adalah menguji stabilitas parameter jangka panjang dan jangka pendek dari persamaan yang diperoleh. Menurut Pesaran & Pesaran (2009), uji ini dapat dilakukan menggunakan *cumulative sum* (CUSUM) dan *cumulative sum squares* (CUSUMSQ). Uji CUSUM digunakan untuk mengidentifikasi perubahan sistematis pada koefisien regresi, sedangkan CUSUMSQ untuk mendeteksi perubahan mendadak dari konstanta koefisien regresi.

Hasil pengujian stabilitas dari model yang diajukan menggunakan CUSUM dan CUSUMSQ dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2. Pada gambar tersebut dapat dilihat nilai statistik CUSUM dan CUSUMSQ berada diantara nilai kritis signifikansi 5 persen. Ini mengindikasikan bahwa koefisien hasil regresi yang diperoleh bersifat stabil.



Gambar 1.
Hasil cumulative sum (CUSUM) of Recursive Residuals



Gambar 2.
Hasil Cumulative Sum of Squares (CUSUMSQ) Of Recursive Residuals

E. SIMPULAN

Hasil pengujian ARDL *bounds test* menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara belanja modal Pemprov DKI Jakarta dengan variabel pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Pada jangka panjang, perkembangan belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 nilai pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal DKI Jakarta berpengaruh secara negatif, tetapi tidak signifikan.

Pada jangka pendek variabel pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila terjadi gangguan/goncangan terhadap keseimbangan, maka sekitar 74,02 persen ketidakseimbangan yang terjadi pada periode sebelumnya akan kembali pada titik keseimbangan pada periode saat ini.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak secara detail mengidentifikasi tentang struktur pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk menginvestigasi struktur PAD atau DBH secara lebih detail dan komprehensif. Tujuannya adalah agar kita dapat mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah atau dana bagi hasil tertentu terhadap belanja modal yang selanjutnya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Clara, R. M. R. D. and Mulyani, H. (2015). Hubungan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 47-57.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*, 4th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Karmeli, E. dan Fatimah, S. (2008). Krisis Ekonomi Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2), 164-173.
- Mentayani, I. dan Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 91-102.
- Nufus, H. dan Asmara, J. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi pada Kab/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1-9.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Pesaran, B. dan Pesaran, M. H. (2009). *Time Series Econometrics using Microfit 5.0: A User's Manual*. Oxford University Press.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., dan Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16, 289-326.
- Pesaran, M. H. dan Shin, Y. (1997). An Autoregressive Distributed *Lag* Modelling Approach to Cointegration Analysis. The paper was a revised version of a paper presented at the Symposium at the Centennial of Ragnar Frisch, The Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, March 3-5, 1995.
- Pratomo, D. S. 2009. Permintaan Pariwisata Indonesia: Studi Kasus Wisatawan Malaysia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(2), 200-209.
- Pratiwi, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 105-120.
- Putra, P. P. M. E. dan Dewi, M. H. U. (2018). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(10), 2163-2189.

- Rambe, R. A. dan Febriani, R. E. (2020). Peran Belanja Pemerintah dan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 57-76.
- Sari, P. K. dan Fakhrudin. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 1(2), 377-388.
- Subowo dan Wati, E. R. 2010. Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 73-82.
- Suryani, F. dan Pariani, E. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 11-22.
- Yunus, S. dan Amirullah (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 186-190. ISSN 2549-4104. E-ISSN 2685-4287.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review. Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35-55.